

BAB II

SEJARAH TERBENTUKNYA ALIANSI MILITER AMERIKA SERIKAT DAN JEPANG

Amerika Serikat dan Jepang memiliki hubungan kerjasama yang sangat kuat, terutama dibidang militer. Kedua negara telah menyepakati kerjasama dibidang pertahanan selama lebih dari 50 tahun sejak disepakatinya Perjanjian San Fransisco. Hingga saat ini hubungan kerjasama militer antar kedua negara tersebut semakin hari semakin kuat, hal tersebut dapat dilihat dengan disepakatinya sebuah panduan kerjasama yang mengatur tentang peran masing-masing negara dalam kerjasama bilateral dibidang pertahanan dan keamanan tersebut. Disahkannya pedoman baru kerjasama pertahanan yakni Japan-US Defense Guidelines 2015 menandakan semakin intensnya kedua negara dalam melakukan kerjasama militer untuk menjaga keamanan kawasan serta perdamaian dunia. Meskipun memiliki sejarah kerjasama yang sangat lama, akan tetapi kedua negara tersebut pernah terlibat konflik sangat hebat yang membuat hubungan kedua negara tersebut menjadi unik. Dimana yang awalnya mereka bermusuhan, namun pada masa sekarang hubungan antara Amerika Serikat dan Jepang sangat solid. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan sejarah singkat hubungan kedua negara serta latar belakang masuknya Pengaruh Amerika Serikat terhadap Jepang.

A. Sejarah Singkat Hubungan Amerika Serikat dan Jepang

Hubungan awal Amerika Serikat dan Jepang dimulai dari konflik, terjadi pada tahun 1939 yang merupakan tahun Pecahnya Perang Dunia II yang menjadi latar belakang perseteruan awal kedua kubu. Konflik internasional yang menyebabkan terbaginya dua kubu yakni blok poros dan blok sekutu. Perang Dunia II ini merupakan konflik yang terjadi akibat dari sisa konflik Perang Dunia I yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Pada tahun 1930 setelah Perang Dunia I Jepang mengalami Great Depression, Jepang berusaha untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan demografinya dengan cara melakukan ekspansi dikawasan Asia-Pasifik, sehingga

memicu perubahan besar dalam kondisi Politik Internasional. (Mutiarahati, 2017, p. 16)

Dalam usaha Jepang untuk mengatasi Great Depression, Jepang menarik perhatian sekutu dengan melakukan sejumlah Ekspansi. Dimulai pada tahun 1931 dengan melakukan Ekspansi terhadap Manchuria dan mendapat kecaman keras dari Liga Bangsa-Bangsa, sehingga Jepang menarik diri dari Organisasi Internasional tersebut. Kemudian pada bulan Juli 1937 terjadi bentrokan di Jembatan Marco Polo Beijing, antara Pasukan Jepang dan Chinayang kemudian pada bulan Desember, setelah Pasukan Jepang berhasil merebut Nanjing (Nanking) yang merupakan ibu kota Partai nasionalis China terjadilah tragedy mengerikan dan sangat kejam yang dilakukan Jepang terhadap penduduk China, dimana pada tanggal 13 Desember 1937 terjadi pembantaian terhadap 300.000 orang dalam seminggu yang dikenal dengan tragedi “Kekejaman Nanking”. Kekejaman yang terjadi di China tersebut mendapat perhatian dan kecaman dari seluruh Dunia, diantaranya kecaman tersebut datang dari Negara-negara Amerika, Eropa dan Asia Tenggara. Ekspansi yang dilakukan oleh Jepang telah melanggar Pacific Treaty yang melarang adanya ekspansi dengan kekerasan (Pruitt, 2018).

Kemudian atas kekejaman yang dilakukan oleh Jepang tersebut, pada bulan Juli 1939 Amerika Serikat mengumumkan penghentian Perjanjian Perdagangan dan Navigasi tahun 1911 dengan Jepang (Brannan, 2018). Amerika Serikat mulai membatasi ekspor berupa materi yang berguna dalam perang terhadap Jepang, seperti pelarangan ekspor besi, minyak dan baja ke Jepang sehingga sebanyak 6.450.000 ton sumber persediaan minyak Jepang berkurang setiap hari. Sehingga dengan hilangnya pasokan minyaknya otomatis melemahkan perekonomian Jepang dan berdampak juga terhadap kekuatan militer Jepang. Serta Amerika Serikat memberi dukungan Ekonomi terhadap pasukan Guomindong. Hal tersebut menjadikan awal dari hubungan politik yang tidak harmonis antara Amerika Serikat dan Jepang (Listiyawan, 2017).

Dampak dari adanya embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Jepang membuat Jepang mencari sumber daya lain untuk tetap memenuhi kebutuhan. Untuk

menyiasati embargo yang dilakukan Amerika Serikat, Jepang menargetkan Indonesia untuk dijadikan wilayah teritorialnya karena Jepang melihat potensi minyak yang ada di Indonesia. Hal ini juga yang melatar belakangi Jepang dalam menjajah Indonesia dan mengusir Belanda dari Indonesia. Sebelum terjadinya serangan terhadap Pearl Harbour Tokyo dan Washington selama berbulan-bulan melakukan negosiasi tentang sanksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Jepang. Sementara itu Amerika Serikat berharap dengan adanya embargo minyak dan barang-barang penting lainnya akan menyebabkan Jepang menghentikan ekspansionismenya, akan tetapi sanksi dan hukuman yang diberikan terhadap Jepang membuat Jepang benar-benar akan mempertahankan wilayahnya dan membangkitkan kemarahan rakyatnya agar terlepas dari gangguan Barat yang terus menerus mengusik Jepang dalam melakukan perluasan kekuasaannya atau ekspansinya di wilayah Asia. Sehingga pada tahun 1940, Jepang menandatangani Pakta Tripartit dengan Jerman dan Italia, dua rezim fasis yang kemudian akan berperang melawan sekutu. (Pruitt, 2018).

1. Jepang Menyerang Pangkalan Militer Amerika Serikat

Embargo yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Jepang membuat keadaan Jepang semakin terpuruk, karena Pasokan minyak dan besi yang diperlukan oleh Jepang sangat bergantung kepada Amerika Serikat. Puncaknya Jepang mulai menargetkan Pangkalan Militer Amerika Serikat yaitu Pearl Harbour sebagai titik penyerangan dan benar-benar ingin memulai peperangan dengan Amerika Serikat. Dengan segala persiapan yang dilakukan oleh Jepang mulai dari pengintaian dan mendapatkan banyak informasi melalui intelijen tentang kekuatan angkatan laut dan militer yang dimiliki Amerika Serikat dipesisir barat Terusan Panama dan Hawaii. Sebelum terjadinya penyerangan, tepatnya tiga hari sebelum pesawat-pesawat tempur Jepang menyerang, Presiden Roosevelt sudah mendapatkan peringatan tentang Jepang yang akan menyerang Pangkalan Militer yang dimiliki Amerika Serikat (Hardoko, 2014). Namun hal tersebut tidak digubris dan

tidak ditanggapi oleh pihak Amerika Serikat dan menganggap peringatan tersebut bukan ancaman yang serius bagi Amerika Serikat karena mereka yakin dan percaya dengan pertahanan yang dimiliki dan berasumsi bahwa kekuatan militer Jepang tidak akan mampu menembus pertahanan kuat Amerika Serikat (Mutiarahati, 2017).

Pada bulan Mei 1940, Amerika Serikat telah memilih Pearl Harbour sebagai basis utama Armada Pasifik. Hal tersebut dilakukan karena Amerika Serikat yakin bahwa Jepang tidak akan mungkin dapat mencapai dan menyerang Pearl Harbour yang berada di Hawaii, karena jarak yang sangat jauh antara Hawaii dan daratan Jepang yaitu sekitar 4.000 mil. Dan pangkalan militer di Pearl Harbour dibiarkan relative tidak terjaga, sehingga menjadikan Pearl Harbour sebagai sasaran yang mudah untuk di target dan di serang. Laksamana Yamamoto Isoroku telah merencanakan serangan ke Pearl Harbour selama berbulan-bulan yang bertujuan untuk menghancurkan Armada Pasifik dan moral Angkatan Laut Amerika Serikat, sehingga ketika Jepang mulai menargetkan Pasifik Selatan sebagai sasaran Ekspansi nya maka tidak akan ada lagi yang menghalangi Pasukan Jepang.

Pada tanggal 7 Desember 1941 Jepang melancarkan serangan mendadak terhadap Pearl Harbour yang merupakan pangkalan angkatan laut Amerika Serikat dekat Honolulu, Hawaii. Tepat sebelum jam 8 pagi pada hari minggu, ratusan pesawat tempur Jepang menyerbu pangkalan tersebut, dimana mereka berhasil menghancurkan atau merusak setidaknya 20 kapal angkatan laut Amerika Serikat, termasuk delapan kapal perang, dan lebih dari 300 pesawat terbang. Serangan tersebut juga menewaskan sebanyak 2.400 jiwa warga Amerika Serikat termasuk pelaut, prajurit dan warga sipil, dan 1.000 orang lainnya terluka. Sehari setelah kejadian serangan tersebut, Presiden Franklin D. Roosevelt meminta kongres untuk menyatakan perang terhadap Jepang (History.com, 2018).

Serangan kejutan yang dilancarkan oleh Jepang ke Pangkalan Militer Pearl Harbour kemudian mendorong

Amerika Serikat ikut ambil andil dalam Perang Dunia II, dimana sebelumnya Amerika Serikat memilih untuk terisolir dan bersikap Netral terhadap Perang Dunia II (Pruitt, 2018).

2. Serangan Bom Atom Amerika Serikat

Sehari setelah terjadinya penyerangan terhadap Pangkalan Militer Pearl Harbor, Presiden Franklin D. Roosevelt memutuskan untuk melakukan Kongres gabungan Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember 1941. Dalam kongres tersebut Presiden Roosevelt menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak gentar dan tidak goyah akan serangan yang dilakukan oleh Jepang terhadap Pearl Harbor. Dalam serangan tersebut Amerika Serikat mengambil langkah untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun melewati diskusi dan debat yang panjang, akhirnya rakyat Amerika Serikat bersatu dan bertekad untuk mengambil keputusan untuk berperang. Langkah Jepang dalam menyerang Amerika Serikat agar mereka terlepas dari Embargo dan terbebas dari sanksi ekonomi justru berbuah masuknya Amerika Serikat yang sebelumnya tidak ingin ikut dalam Perang besar dan terdorong untuk ikut masuk dalam konflik global yang pada akhirnya berbuah bencana bagi Negara Jepang itu sendiri. (History.com, 2018)

Pada 8 Desember, Kongres Amerika Serikat menyetujui deklarasi Perang terhadap Jepang yang diajukan oleh Presiden Roosevelt. Tiga hari kemudian pihak sekutu yang terdiri dari Jepang Jerman dan Italia menyatakan perang melawan Amerika Serikat. Dan Kongres Amerika Serikat juga membalas dengan pernyataan perang terhadap kekuatan Eropa.

Setelah empat tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1945 Amerika Serikat mengusung “misi balas dendam” terhadap Jepang. Dibawah perintah Presiden Harry S. Truman, Amerika Serikat melancarkan serangannya dengan menggunakan teknologi yang canggih. Amerika Serikat yang mempunyai teknologi canggih di bidang militer berhasil menciptakan tiga buah bom atom yang siap untuk menyerang Jepang. Uji coba pertama bom atom dilakukan

oleh Amerika Serikat dengan menjatuhkan bom atom sejauh 80 km dari Alamogordo, New Mexico pada tanggal 16 Juli 1945. Setelah melalui serangkaian uji coba nuklir kemudian, untuk pertama kalinya bom nuklir di aplikasikan ke dalam perang sesungguhnya.

Pemakaian bom atom pertama kali di dalam peperangan ketika Pasukan Amerika Serikat yang telah mengintai lama Jepang dari Tinian Base yang berada di kepulauan Mariana, Pasifik, mulai bergerak untuk menyerang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat mengirimkan Pesawat pembom yang diberi nama Enola Gay. Pesawat tersebut membawa bom atom yang mengandung uranium 235. Bom atom yang memiliki julukan "Little Boy" tersebut diledakkan di ketinggian sekitar 580 meter diatas permukaan kota Hiroshima di Jepang dan berhasil menyapu hampir 80% seisi kota terbesar di Jepang tersebut. Hampir tidak ada korban selamat disepanjang radius wilayah Hiroshima yang terkena dampak ledakan bom atom tersebut. Tingkat radiasi yang sangat tinggi menyebabkan persentase kehidupan diwilayah kota Hiroshima menjadi sangat kecil. (Mutiarahati, 2017)

Dijatuhkannya bom atom pertama oleh Amerika Serikat menjadi peringatan pertama untuk Jepang agar segera menyerah dan mundur dalam pertempuran melawan Amerika Serikat, akan tetapi Jepang masih tetap dalam pendiriannya untuk tidak tunduk terhadap kekuatan barat. Kehancuran dahsyat yang menimpa kota Hiroshima dengan puluhan ribu korban jiwa tidak menyurutkan semangat tentara Jepang untuk tetap berperang. Melihat pasukan Jepang yang tidak ingin menyerah, akhirnya Amerika Serikat kembali membuat serangan di hari ketiga setelah bom yang menghancurkan Hiroshima dijatuhkan. Pada tanggal 9 Agustus 1945 Amerika Serikat mengirimkan dua pesawat B-29 "*Bockscar*" yang diberangkatan dari Tinian Base dengan membawa bom nuklir kedua yang diberi nama "*Fat Man*" untuk menyerang Nagasaki. Target sesungguhnya bukanlah Nagasaki, Amerika Serikat ingin mengincar daerah Kokura yang berada disekitar timur laut

Prefektur Fukuoka di pulau Kyushu. Namun setelah berputar-putar selama 10 menit diatas langit kokura, pesawat B-29 tidak dapat menemukan lokasi target yang telah ditentukan karena terhalang oleh cuaca buruk dengan kabut yang sangat tebal, sehingga pesawat B-29 memutar arah dan meninggalkan target pertamanya dan mengalihkan target serangan menuju Nagasaki. Setelah pesawat B-29 mencapai nagasaki, Bom atom kedua yang diberi nama “Fat Man” dijatuhkan dari ketinggian 9000 m diatas permukaan tanah dari Nagasaki (Nishiwaki, 1995). Pada akhir tahun 1945, total korban meninggal yang diakibatkan oleh bom atom tersebut diperkirakan kurang lebih sebesar 140.000 jiwa di Hirshima dan 74.000 korban jiwa di Nagasaki, termasuk korban yang meninggal karena terdampak radiasi yang mematikan. Pada lima tahun terakhir korban meninggal akibat serangan bom atom terus bertambah total 200.000 jiwa meninggal karena kanker dan efek jangka panjang lainnya (Browne, 2016).

Serangan Amerika Serikat yang begitu dahsyat akhirnya meruntuhkan kegigihan dan semangat juang Jepang. Pemimpin Jepang yakni kaisar Hirohito langsung memerintahkan para panglima perangnya untuk mempersiapkan penyerahan diri Jepang terhadap Amerika Serikat dan sekutu. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Kaisar Hirohito resmi menyatakan kekalahan Jepang dan menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutu melalui siaran Radio. Kemudian hal tersebut menjadi penanda bahwa telah berakhirnya Perang Dunia II.

B. Masuknya Pengaruh Amerika Serikat di Jepang

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Jepang menjadi sangat hancur. Seluruh kota besar (kecuali Kyoto), industri dan jaringan transportasi mengalami kerusakan yang sangat parah. Kekurangan makanan terjadi dimana-mana berlanjut selama beberapa tahun. Setelah krisis yang begitu hebat terjadi diseluruh penjuru Jepang, kemudian Amerika Serikat dan sekutu mengambil alih dalam pendudukan dan rehabilitasi negara Jepang (Jones, 2018).

Pada bulan September 1945, Jenderal Douglas A. MacArthur mengambil alih Komando Tertinggi Kekuatan Sekutu yakni *Supreme Comando for the Allied Powers* (SCAP) dan memulai pekerjaan membangun kembali Jepang. seluruh Operasi Utama dilakukan oleh Amerika Serikat. Jenderal MacArthur memberlakukan reformasi militer, politik, ekonomi dan sosial yang tersebar luas. Meskipun Inggris Raya, Uni Soviet, dan Republik Cina memiliki peran sebagai penasihat bagian dari “Dewan Sekutu”, MacArthur memiliki wewenang terakhir untuk membuat semua keputusan. Pendudukan Jepang dapat dibagi menjadi tiga fase: upaya awal untuk menghukum dan mereformasi Jepang menjadi negara yang demokratis, menstabilkan kembali ekonomi Jepang, dan kesimpulan dari perjanjian damai formal dan aliansi. (Historian, 2017)

Fase pertama dalam pembangunan kembali Jepang terjadi dari akhir perang dunia tahun 1945 hingga 1947, melibatkan perubahan paling mendasar bagi pemerintah dan masyarakat Jepang. Sekutu menghukum Jepang karena militerisme dan ekspansi yang dilakukan oleh Jepang di masa lalunya dengan mengadakan persidangan kejahatan perang di Tokyo. Pada saat yang sama, SCAP membongkar dan melucuti Angkatan Darat Jepang dan melarang mantan perwira militer untuk mengambil peran kepemimpinan politik dalam pemerintahan baru. Di bidang ekonomi, SCAP memperkenalkan program reformasi tanah, dimana program tersebut dirancang untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi mayoritas petani penyewa dan mengurangi kekuatan pemilik tanah yang kaya sehingga terjadi keadilan dan keseimbangan antara petani pekerja dan pemilik tanah. MacArthur juga mencoba memecah konglomerat bisnis besar Jepang, hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengubah ekonomi menjadi sistem kapitalis pasar bebas. (Historian, 2017)

Melalui SCAP ini pengaruh Amerika Serikat terhadap Jepang mulai memasuki babak baru. Program-program yang dicanangkan oleh SCAP mulai dijalankan, Amerika Serikat mengizinkan untuk memepertahankan Kaisar Hirohito dengan syarat Kaisar Hirohito melepaskan kekuasaannya atas Jepang dan ikut menyetujui dan secara terbuka mendukung Konstitusi

baru di Jepang. Amerika Serikat memaksa Jepang untuk membuat sebuah konstitusi dimana konstitusi tersebut sangat membatasi ruang gerak Jepang dibidang militer dan secara tidak langsung menghilangkan kemampuan Jepang untuk berperang. Ketentuan tersebut tertuang di Pasal 9 konstitusi baru Jepang yang berisi :

“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as a mean of settling international disputes. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.” (Jones, 2018)

Konstitusi baru Jepang tersebut disahkan pada tanggal 3 Mei 1947. Dengan disahkannya konstitusi tersebut menjadi bukti bahwa Jepang telah berkomitmen untuk tidak lagi mengikuti atau mendukung perang dan tidak terlibat kekerasan melalui instrumen militernya dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah konflik internasional. Hal ini dilakukan juga bertujuan untuk memulihkan kembali reputasi Jepang yang tercoreng akibat peperangan yang dilakukan oleh Jepang di masa lalu yang membuat dunia Internasional tidak lagi mempercayai Jepang akibat kekejaman yang pernah dilakukan oleh Jepang. Dengan adanya konstitusi baru tersebut bertujuan agar mengembalikan citra dan reputasi Jepang di mata publik Internasional.

Dengan diresmikannya Pasal 9 Konstitusi baru Jepang, Amerika Serikat berhasil melucuti militer Jepang dan “mengebiri” Jepang dalam sistem pertahanan dan keamanannya. Dikarenakan dengan konstitusi tersebut Jepang tidak diizinkan untuk menggunakan instrumen militer bahkan untuk membela diri sekalipun, sehingga sebagai gantinya Amerika Serikat harus mengambil tanggung jawab untuk melindungi Jepang dari segala bentuk ancaman dari luar. Hal ini dapat mengurangi kekhawatiran negara-negara lain terhadap kembalinya agresifitas Jepang. (Jones, 2018)

Setelah situasi internasional porak poranda dan sangat berfokus pada Perang Dunia II, kemudian muncul persaingan

sensitif yang mengakibatkan pergeseran situasi internasional yang disumbri antara dua kekuatan besar yang memiliki pengaruh sangat kuat di dunia internasional yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kehidupan politik internasional memasuki musim Perang Dingin. Ancaman komunis dalam Perang Dingin sangat nyata, persaingan dalam penyebaran ideologi yang sangat berbeda antara kedua Negara besar tersebut menjadi Topik utama dan menjadi awal terjadinya Perang Dingin. Perseteruan kedua Negara besar tersebut sangat disayangkan, mengungat Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan satu aliansi pada Perang Dunia II sebagai sekutu. Karena tidak adanya musuh bersama yang harus dihadapi, maka keduanya saling bersaing satu sama lain. (Mutiarahati, 2017)

Persaingan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin menguat hingga puncak pertikaian mereka terjadi di Korea dimana Korea merupakan target penyebaran ideologi masing-masing negara. Pembagian wilayah yang terjadi di semenanjung Korea pada tahun 1945 menyebabkan terbaginya wilayah Korea menjadi dua wilayah yaitu Korea Selatan (*Republic of Korea*) dan Korea Utara (*Democratic People's of Korea*) dan menyebabkan pecahnya perang saudara di wilayah Korea yang disebut dengan *Korean War* pada tahun 1951 (Mutiarahati, 2017).

Pasukan Amerika Serikat yang berusaha untuk menghapus ideologi komunis yang dianggap sebagai kontra ideologinya demokrasi, menggunakan Jepang sebagai basis untuk melawan agresi komunis di Korea. Amerika Serikat memiliki tujuan untuk mempertahankan pengaruhnya di Asia, sehingga pada saat itu Amerika Serikat serangkaian perjanjian keamanan yang pertama dengan Jepang (Jones, 2018). Pasukan Amerika Serikat yang pada saat itu ingin berkonsentrasi di wilayah Korea tidak begitu saja melepaskan Jepang dari pengawasan Ameriak Serikat. Karena Militer Jepang sudah “dikebiri” oleh Amerika Serikat, maka melalui pasukan militer SCAP memberikan perintah kepada Jepang untuk mulai membentuk Pasukan Pertahanan diri darat, udara dan laut Jepang yang disebut dengan Japanese ground, air and sea self-defense force (JDSF). JDSF dibentuk pada tahun 1954 dan pada dasarnya adalah bagian dari pasukan

polisi lokal karena pembatasan konstitusional yang disebut dengan *Pasukan Keamanan Nasional atau National Police Reserve (NPR)* sebagai pasukan militernya. Karena terbatasnya kinerja yang dilakukan oleh polisi lokal tersebut dan tidak cukup untuk meng-*backup* seluruh wilayah Jepang, maka diambil langkah untuk mengganti Pasukan Keamanan Nasional Jepang tersebut dengan Pasukan Bela Diri Jepang atau Self Defense Forces (SDF) yang memiliki tugas lebih kompleks. (Mutiarahati, 2017)

C. Perjanjian Kerja Sama Jepang dan Amerika Serikat di Bidang Pertahanan

Setelah berakhirnya perang dunia II dengan ditandai menyerahnya Jepang tanpa syarat terhadap sekutu dan berakhir dengan masuknya pengaruh Amerika Serikat di Jepang. Untuk menjaga ketegangan antara Amerika Serikat dan Jepang Pasca Perang Dunia II, Kedua negara melakukan kesepakatan pertama yang menjadi awal dari kerjasama bilateral di bidang keamanan. Amerika Serikat dan Jepang kemudian melakukan kerjasama dibidang militer, yang terbentuk dalam sebuah aliansi. Aliansi keamanan Amerika Serikat dan Jepang telah menjadi salah satu hubungan militer paling penting di kawasan Asia-Pasifik dan sebagai jangkar dari peran keamanan Amerika Serikat di Asia. Dalam kesepakatan yang pertama kali dibuat oleh dua negara tersebut lahirlah dua perjanjian yakni *San Fransisco Treaty* dan *Japan-US Security Treaty* pada tanggal 8 September 1951.

1. San Fransisco Treaty

Sebagai pihak yang kalah dalam Perang Dunia II, Jepang berusaha membangun kembali pemerintahannya. Dengan militer yang sudah dilucuti, Jepang tidak memiliki pilihan lain selain membuat perjanjian dengan Amerika Serikat sebagai pemenang pada Perang Dunia II. Jepang mengambil keputusan untuk mengembalikan kembali perekonomiannya yang sempat jatuh akibat Perang Dunia II dan menyepakati perjanjian damai yang dilakukan bersama negara-negara untuk menjaga perdamaian dunia. Perjanjian San Fransisco ditandatangani oleh empat puluh delapan delegasi dari berbagai negara yang berkumpul di Gedung

Opera San Fransisco pada tanggal 8 september 1951. Perjanjian ini menandai berakhirnya permusuhan antara para penandatangan yang dibuat untuk menghapuskan pendudukan dan menentukan rincian penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Perang.

Penandatanganan San Fransisco Treaty ini merupakan komitmen yang dibangun oleh Amerika Serikat dan Jepang untuk saling menjaga perdamaian sesuai dengan mandat perserikatan bangsa-bangsa dan saling berkomitmen untuk tidak akan terlibat atau memulai perang. Didalam perjanjian San Fransisco Treaty ini terdapat 7 chapter yang menjadi tanggung jawab bagi Jepang untuk melaksanakannya sebagai pihak yang kalah perang.

Dengan diresmikannya San Fransisco Treaty, kependudukan Amerika Serikat di Jepang resmi berakhir. Pokok dari San Fransisco Treaty tersebut adalah kesepakatan damai untuk tidak saling menyerang dan untuk mengakhiri konflik satu sama lain.

Bersamaan dengan perjanjian San Francisco, Jepang dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian keamanan pertama mereka. Dalam perjanjian itu, Jepang mengizinkan Amerika Serikat untuk menempatkan pasukan, angkatan laut, dan personil angkatan udara di Jepang untuk pertahanannya. Amerika Serikat juga mengembalikan sebagian pulau Jepang kembali ke dalam kontrol teritorial Jepang. Hal tersebut dilakukan secara bertahap, dimulai dengan mengembalikan sebagian pulau Ryukyu pada tahun 1953, Bonins pada tahun 1968 dan Okinawa pada tahun 1972 (Jones, 2018). Jepang mengakui UN Charter yang berisi tentang perdamaian dunia, namun Jepang masih memungkinkan untuk ikut bergabung dalam kerjasama keamanan secara kolektif dengan negara lain. Jepang menyerahkan hak istimewanya di Tiongkok dan menerima keputusan dari *International Military Tribunal for the Far East* (IMTFE).

2. US-Japan Mutual Security Treaty

Ditandatangani pada tahun 1951 bersamaan dengan Perjanjian San Fransisco yang mengakhiri Perang Dunia II, US-Japan Mutual Security Treaty adalah aliansi keamanan AS-Jepang salah satu hubungan militer yang penting di kawasan Asia Timur dan sebagai jangkar peran keamanan Amerika Serikat di Asia. Direvisi pada tahun 1960, perjanjian militer yang membahas tentang peraturan keamanan untuk Jepang berdasarkan konstitusi pasifiknya memberikan Amerika Serikat hak untuk membangun pangkalan militer di Kepulauan Jepang dengan syarat AS akan membela dan melindungi Jepang jika terjadi serangan. Perjanjian ini membuat Pasukan AS akan tetap berada di tanah Jepang hingga Jepang memperoleh kembali kedaulatannya. Pakta keamanan awal dengan Washington ini cocok dengan Doktrin Yoshida atau *Yoshida's Doctrine*, dimana Doktrin tersebut merupakan sebuah strategi besar untuk Jepang pada saat Pascaperang yang dibuat oleh perdana menteri Jepang saat itu yaitu Yoshida Shigeru. Jepang melihat bahwa dalam kebutuhan keamanannya Jepang dapat mengandalkan Amerika Serikat, sehingga Jepang dapat berfokus pada pemulihan ekonomi didalam negeri yang menjadi tujuan utama Jepang setelah kalah dalam Perang Dunia II. (Xu, 2014)

Dengan adanya Aliansi Keamanan AS-Jepang pada saat itu, Amerika Serikat bertujuan ingin mempertahankan kehadirannya di Jepang dan menggunakan aliansi untuk meningkatkan pengaruh dan peran strategisnya di Asia Timur. Hal tersebut dilakukan untuk menghadapi Semenanjung Korea yang terpecah setelah Perang Korea akibat persaingan dengan Uni Soviet, dan iklim Perang Dingin dimana militer China dan Uni Soviet memperluas kawasannya dan meningkatkan kemampuan militer mereka. Dengan Latar Belakang tersebut juga, pemerintah Yoshida menciptakan Pasukan Bela Diri (SDF) pada tahun 1954, meskipun ada sedikit pertentangan yang kuat dengan Pasal Sembilan Konstitusi yang dicanangkan pascaperang, yang

menghindari pemeliharaan militer atau penggunaan pasukan untuk menyelesaikan perselisihan internasional. (Xu, 2014)

Berdasarkan perjanjian tersebut, Amerika Serikat memiliki hak untuk mempertahankan kekuatan darat, laut dan udaranya di Jepang. Kekuatan ini dapat dipergunakan: (1) untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan di Timur Jauh tanpa konsultasi terlebih dahulu; (2) setelah berkonsultasi, Amerika Serikat dapat melakukan tindakan untuk mempertahankan Jepang dari serangan pihak luar. Perjanjian tersebut merinci bahwa operasi yang dijalankan dari basis Jepang oleh pihak lain “harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah Jepang”.

Perjanjian ini kemudian menjadi penanda awal mula masuknya pengaruh Amerika Serikat di Jepang dalam bidang keamanan. Jepang menjadikan Amerika Serikat sebagai “payung” militer bagi Jepang dan memiliki hak dan tanggung jawab atas keamanan wilayah teritorial Jepang. Amerika Serikat memanfaatkan hak nya di wilayah teritorial Jepang untuk membangun pangkalan militer beserta pasukan dan persenjataan yang lengkap di kepulauan Okinawa Jepang. Okinawa menjadi basis penting Amerika Serikat dalam misinya untuk memperkuat pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Hubungan kerja sama Amerika Serikat dan Jepang sebenarnya hanya sebatas dibidang pertahanan saja, kerjasama tersebut terus berlanjut hingga munculnya kesepakatan bersama mengenai panduan dalam kerjasama keamanan antara kedua negara tersebut yang tertuang pada *Japan-US Defense Guidelines* pada tanggal 27 November 1978. Panduan tersebut berisi tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan Amerika Serikat dan Jepang dengan keterlibatan US Forces dan SDF dalam situasi ketika Jepang diserang oleh pihak luar. (Mutiarahati, 2017)